



# Pengaruh Kehadiran Kekuatan Militer Negara Besar (*Major Power*)

Laksamana Muda TNI Suselo  
Peserta PPSA XX

## Abstrak

*Kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan yang paling dinamis setelah Perang Dingin berakhir. Pengaruh Amerika Serikat dan Rusia (Uni Soviet) di kawasan ini mulai mendapat tantangan dari China, Jepang, dan India yang mulai menyebar pengaruhnya di kawasan tumbuh menjadi major powers. China, Jepang, dan India kini tengah mengembangkan strategi kawasan untuk mengamankan kepentingan nasional mereka masing-masing. Perkembangan ini tentu berdampak pada kepentingan nasional Indonesia di kawasan.*



## LATAR BELAKANG.

Asia Pasifik (Aspas) merupakan kawasan yang paling dinamis, meliputi pesisir pantai Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk negara-negara di Samudera Pasifik, yang terdiri dari sekitar 35 negara. Aspas memiliki daya tarik tersendiri bila dikaitkan dengan kepentingan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS), dan dari sisi kepentingan keamanan pada awal Perang Dingin. Negara-negara besar (*major power*) mendominasi berbagai peran dalam kepentingan keamanan di kawasan ini. Indikasi peningkatan belanja militer di kawasan Aspas mencapai 65 persen antara tahun 2004 dan 2014, menimbulkan implikasi adanya masalah keamanan antar negara yang meningkat<sup>1</sup>.

Indonesia sebagai negara berdaulat yang berada di wilayah Aspas yang sangat strategis, harus mengantisipasi pengaruh negatif dari kehadiran kekuatan militer *major power* untuk kepentingan nasional Indonesia, dengan berbagai upaya-upaya *external* yang konstruktif dengan kerjasama *multilateral* maupun *bilateral* yang mengacu politik luar negeri Indonesia, serta upaya internal sebagai langkah antisipatif untuk kepentingan nasional.

## PEMBAHASAN

**Dinamika Perkembangan Kekuatan Militer Negara-Negara Besar (*Major Power*) dan Terbentuknya Arsitektur Keamanan di Asia Pasifik.**

AS dengan pengeluaran anggaran tahun 2008 sebesar \$ 623.000.000.000<sup>2</sup>, telah memiliki kekuatan militer paling kuat di dunia. Hal tersebut sebagai langkah penyeimbang atas perkembangan kekuatan militer China. Strategi *rebalancing* merupakan strategi politik luar negeri Presiden Obama saat ini, yang memprioritaskan kawasan Aspas dalam kebijakan AS. AS bertekad tidak mau kehilangan pengaruhnya di Aspas, sehingga mulai tahun 2012 s.d. tahun 2020, Armada Laut AS akan fokus di kawasan ini. AS merencanakan memperluas pangkalan militer, yakni di: Diego Garcia, Christmas Island, Coco Island, Darwin, Guam, Subic, Malaysia, Singapura, Vietnam, hingga kepulauan Andaman Nicobar dan kawasan lainnya di Asia Pasifik yang dikendalikan oleh USPACOM di Hawaii. Strategi AS tersebut, erat kaitannya dengan pengembangan militer Tiongkok dalam “Strategi Dua Samudera” yang akan tergelar tahun 2020. AS sebagai *major power*, tidak segan melibatkan diri apabila Tiongkok melakukan kontrol terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS), terlebih bila terjadi konflik dengan Filipina sebagai sahabat dekat AS yang sejak tahun 1951 telah menyepakati adanya *Mutual Defense Treaty*.

Sejak tahun 1947, Tiongkok telah membuat peta resmi wilayah kedaulatannya dengan memberi 9 garis putus-putus “*Nine Dotted Line*”, yaitu garis batas berbentuk “U” di kawasan LTS, yang dipublikasikannya secara diam-diam sejak Februari 1948. Secara resmi Tiongkok mendaftarkan klaim-



nya pada tanggal 7 Mei 2009 di PBB. Akibatnya beberapa negara, yaitu Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan yang juga mengklaim Kepulauan Paracel dan Spratly, serta merta melancarkan protes keras terhadap klaim Tiongkok tersebut. Kawasan LTS telah menjadi isu strategis yang selalu diperdebatkan di berbagai forum global, regional maupun nasional.

Selanjutnya China telah menganggarkan pada tahun 2004 sebesar \$ 65,0 miliar, untuk membangun kemampuan *blue water navy* dengan kapal induk kelas *carrier* 40.000 ton pada tahun 2010<sup>3</sup> yang didukung dengan kekuatan udara dan kemampuan nuklir strategis. Tiongkok telah memainkan *soft power* (dengan berbagai program bantuan internasional) untuk menyebarkan pengaruh mereka ke negara-negara di kawasan Asia. Sejak tahun 2014, Tiongkok sangat agresif melakukan kegiatan reklamasi pada terumbu karang dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Spratly, untuk dijadikan pangkalan militer khususnya di Pulau *Fiery Cross Reef*. Sesuai dengan foto satelit, pangkalan militer yang dibangun telah memiliki landasan pacu berukuran panjang sekitar 3 kilometer, lebar sekitar 200-300 meter, sehingga dapat digunakan untuk *take-off* dan *landing* pesawat pembom RRT H-6 jet dan pesawat angkut militer jumbo Y-20. Tiongkok juga membangun pelabuhan baru yang cukup besar untuk dermaga kapal tanker militer, sehingga para ahli percaya Beijing bertujuan untuk membangun basis strategis di kawasan

tersebut.<sup>4</sup>

Pada tahun 2010-2020, Tiongkok mencanangkan *Off Shore Operation* sepanjang *1<sup>st</sup> Island chain* dan pembangunan "*Green Water Navy*", dengan pengembangan kapal besar permukaan, kapal selam nuklir, dan pesawat tempur untuk kapal induknya. Pada tahun 2020-2050 akan melakukan finalisasi program pesawat tempur dan pembangunan kekuatan "*Blue Water Navy*" yang mampu beroperasi di *2 High Seas*.<sup>5</sup>

Negara-negara *major power* lainnya, antara lain Rusia dengan anggaran tahun 2007 sebesar \$ 50 miliar, telah memiliki kekuatan militer terkuat kedua di dunia, dengan mesin perang yang canggih dan mempengaruhi dunia selama 6 dekade terakhir. Rusia saat ini, telah memiliki kemampuan nuklir baru yaitu berupa Topol M rudal balistik<sup>6</sup>. Sementara Jepang menaikkan pengeluaran anggaran belanja militernya sejak tahun 2007 menjadi sebesar \$ 41.750.000.000. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengimplementasikan strateginya di kawasan LTS.<sup>7</sup> Jepang sejak tahun 2010 telah mulai membentuk haluan baru pertahanannya untuk mengimbangi kekuatan militer Tiongkok dan menjalin kerjasama strategis dengan AS untuk menjamin keamanan nasionalnya.<sup>8</sup> Selain itu, melalui peranan ekonominya, Jepang meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di kawasan melalui transfer teknologi dan modal ke negara-negara yang sedang berkembang di Asia.



India sebagai Negara di Asia Selatan, telah mengeluarkan belanja militernya tahun 2009-2010 sebesar \$ 32,7 miliar, sehingga menjadikan kekuatan militernya paling berpengaruh di Asia Selatan dengan koleksi rudal nuklir Agni. Korea Selatan, dengan anggaran belanja militer tahun 2008 sebesar \$ 28,5 miliar telah memiliki kesiapan yang mantap untuk menghadapi Korea Utara. Sedangkan Australia pada tahun 2008 telah menghabiskan anggaran militer sebesar \$ 24,8 miliar, telah menjadi sekutu utama AS.

### Sikap Indonesia Terhadap Pengaruh Kehadiran Kekuatan Militer Negara-Negara Besar (*Major Power*) di Kawasan Aspas

Dinamika perkembangan kekuatan negara-negara besar (*major power*) Asia Pasifik, mengindikasikan ada kekuatan-kekuatan baru yang akan sangat berperan di Asia Pasifik di dekade yang akan datang. Ada *power shift* yang dramatis di Asia Timur dengan berlanjutnya supremasi AS, kebangkitan China dan India, kehadiran Japan dan kembalinya Russia. Dibutuhkan urgensi untuk mendesain ulang (*new arrangement*) pilar politik luar negeri Indonesia sebagai bentuk aksi elaboratif atas dinamika konstelasi ini<sup>9</sup>. Perlu keseimbangan *soft power* antara masalah diplomasi dengan masalah ekonomi, politik dan lainnya. Kerjasama bilateral dengan Negara penting dan strategis bagi Indonesia, antara lain dengan AS, RRT, dan *major power* lainnya di Aspas melalui komitmen *Comprehensif*

*Partnership* yang telah disepakati perlu selalu ditingkatkan di berbagai bidang termasuk bidang kerjasama pertahanan dan militer yang saling menguntungkan. Kerjasama pertahanan dan militer melalui forum multilateral ADMM, ADMM *Plus* dan ACDFIM termasuk inisiatif TNI yang telah disepakati tentang perlunya forum ACDFIM *Plus* tentunya harus diikuti dengan aktif guna mengalihkan potensi konflik menjadi potensi kerjasama.

Selanjutnya yang paling penting adalah secara internal, Indonesia perlu segera mempercepat pencapaian renstra pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) dengan membangun sistem pertahanan yang memiliki *deterrence standard*.<sup>10</sup> Upaya pembangunan pangkalan militer yang memadai untuk mendukung operasionalisasi alutsista TNI AL dan TNI AU, khususnya di Kepulauan Natuna merupakan langkah antisipasi yang bijak guna mengurangi dampak negative konflik bersenjata di LTS bila sewaktu-waktu terjadi. Di samping itu, Indonesia juga perlu segera melaporkan secara resmi batas wilayah ZEEI dan landasan kontinennya di timur laut Kep. Natuna ke PBB, karena masuk (*overlap*) dengan 9 garis putus-putus RRT.

### KESIMPULAN

Aspas merupakan kawasan yang dinamis dan strategis serta sangat berperan penting bagi *major power* di kawasan. Belanja militer yang meningkat



antara tahun 2004 dan 2014, telah menimbulkan arsitektur keamanan yang sulit diprediksikan dikawasan ini. Bagi Indonesia yang mengacu politik luar negeri bebas aktif, memandang kawasan Aspas haruslah menjadi kawasan damai, stabil dan sejahtera, yang dapat dicapai dengan kerjasama Internasional dibidang pertahanan dan militer secara bilateral dan multilateral. Selanjutnya secara internal renstra MEF TNI, khususnya pembangunan pangkalan militer TNI AL dan TNI AU di Kep. Natuna, dan pelaporan secara formal batas ZEEI di PBB perlu direalisasikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku Putih Pertahanan RI. 2014. Jakarta : Kemhan RI.

Connie Rahakundini Bakri. 2013. "Security Maritime dan Digantara Indonesia". Majalah Angkasa, Edisi Koleksi.

Lampiran Lembar Penugasan Penulisan Diskusi Pendalaman (DD-2) SBS. Regional Kawasan on Campus Blok-III PPSA XX, pada Latar Belakang TOR. Jakarta, September 2015.

Mohamad Yani, Dr. 2014. *Makna Kerjasama Militer RI-Cina*, Fak Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.

Robert S. Ross. 2006. "Balance of Power Politics and the Rise of China: Accommodation and Balancing in East Asia". Security Studies, Vol. 15 No. 3.

Sam Parlo Freeman dan Carina Solmirano. 2014. *Military Spending and Regional Security in Asia Pacific*. SIPRI.

VOA, Menhan AS : *Perjanjian TPP, Kebijakan Penting Obama di Asia Pasifik*, Minggu, 4 Oktober 2015.

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2067rank.html>, *CIA World Factbook, Military expenditures*, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2015, Pkl. 11.00 wib.

<http://www.jejaktapak.com/2014/11/24/pangkalan-china-di-pulau-spratly-awal-ketidakseimbangan-asia-tenggara/>, diunduh pada tanggal 20 September 2015, Pkl. 16.00 wib.

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1330223.stm>, Japan's controversial shrine, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2015, Pkl. 11.30 wib.

#### Endnotes

1 Sam Parlo Freeman dan Carina Solmirano, *Military Spending and Regional Security in Asia Pacific*, SIPRI : 2014.

2 Robert S. Ross, "Balance of Power Politics and the Rise of China: Accommodation and Balancing in East Asia", Security Studies :2006Vol. 15 No. 3.

3 <https://www.cia.gov/library/>



publications/the-world-factbook/rankorder/2067rank.html, CIA *World Factbook, Military expenditures*, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2015, Pkl. 11.00 wib.

- 4 <http://www.jejaktapak.com/2014/11/24/pangkalan-china-di-pulau-spratly-awal-ketidakeimbangan-asia-tenggara/>, diunduh pada tanggal 20 September 2015, Pkl. 16.00 wib.
- 5 Connie Rahakundini Bakri, “*Security Maritime dan Digantara Indonesia*“, Majalah Angkasa : 2013, Edisi Koleksi.
- 6 Ibid.
- 7 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1330223.stm>, Japan’s controversial shrine, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2015, Pkl. 11.30 wib.
- 8 *The Military Balance, Chapter Six: Asia, Military Modernisation Continues*, (London: Routledge, 2013), hlm. 245.
- 9 Dr. Mohamad Yani, *Makna Kerjasama Militer RI-Cina*, Faklmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2014.
- 10 Buku Putih Pertahanan RI 2014, bagian Pendahuluan, pembangunan-kekuatan pertahanan.